UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peranan

Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005:148), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan social akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Miftah Thoha (2005:10), peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Selanjutnya menurut Henry Mintzberg (Dalam Triantoro Safaria, 2004:23) peran adalah seperngkat harapan yang dibebankan kepada seorang manajer atau pemimpin untuk menentukan bagaimana perilaku yang baik serta diterima menurut lingkungan sosialnya.

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu fungsi yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang individu atau organisasi, lembaga, ataupun badan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.

2.2 Ketahanan Pangan

Maxwell dan Smith dalam Gevisioner (2010:15) mengatakan bahwa ketahanan pangan menunjukkan adanyaakses setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap waktu. Hal ini berarti ketahanan pangan memiliki empat dimensi, yaitu:

a. kecukupan pangan, yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi untuk aktif dan hidup sehat,
b. akses pangan, yang berarti adanya kemampuan untuk memproduksi, membeli panganmaupun menerima pemberian pangan,
c. jaminan, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan dan
d. waktu, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan secara berkelanjutan.

Ketahanan Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pengertian Ketahanan pangan tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Pangan disini bukan hanya beras tetapi mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan dan hewan termasuk ikan baik produk primer maupun turunannya termasuk air minuman dengan demikian proses produksi pangan tidak hanya dihasilkan oleh kegiatan sector pertanian tetapi juga pada industri pengolahan pangan.
b. Menyediakan pangan yang cukup diartikan sebagai penyediaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu untuk memenuhi asupan zat gizi.
c. Tersedianya pangan dalam kondisi aman diartikan sebagai bebas dari kandungan bahan biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu dan merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari aspek kaidah agama.
d. Disamping keamanan pangan pemenuhan pangan perlu diperhatikan aspek mutu yang mencakup kenampakan fisik, citarasa, kandungan, zat gizi maupun keanekaragaman dan kelengkapan zat gizi.
e. Tersedianya pangan dengan kondisi yang merata diartikan pangan tersedia setiap saat disetiap daerah lokasi penduduk diseluruh daerah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh setiap rumah tangga secara fisik maupun ekonomi yaitu dalam jarak dan harga yang terjangkau setiap saat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan mengandung makna makro dan mikro. Makna makro terkait dengan penyediaan pangan di seluruh wilayah setiap saat, sedangkan makna mikro terkait dengan kemampuan rumah tangga dan individu dalam mengakses pangan dan gizi sesuai kebutuhan dan pilihannya untuk tumbuh, hidup sehat dan produktif. Ketahanan pangan melekat pada individu, masyarakat, wilayah hingga tingkat nasional.

Pengembangan ketahanan pangan mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar, karena:

1. Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang bagi segenap rakyat Indonesia merupakan hak yang paling azasi bagi manusia.
2. Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan konsumsi pangan dan gizi.
3. Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisikdan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi. untuk hidup sehat, aktif, dan produktif (KUKP Dewan Ketahanan Pangan, 2010).

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan (Saliem, dkk, 2002).

Ada tiga pilar yang mendukung bangunan ketahanan pangan. Pertama, ialah ketersediaan pangan sebanyak yang diperlukan oleh masyarakat yang mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi, cadangan maupun impor dan ekspor. Kedua, ialah distribusi yang mencakup aksesabilitas pangan antar wilayah dan antar waktu serta stabilitas harga pangan strategis. Ketiga, ialah konsumsi yang mencakup jumlah, mutu gizi/nutrisi, keamanan dan keanekargaman konsumsi pangan (Suparmo dalam Usman, 2004:66).

2.3 Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien) (Dewan Ketahanan Pangan, 2006).Sementara menurut Saliem, dkk(2002) kerawanan pangan di tingkat wilayah maupun tingkat rumah tangga/individu merupakan kondisi tidak tercapainya ketahanan pangan di tingkat wilayah maupun rumah tangga.individu.

Adapun status ketahanan pangan Provinsi Riau dari tahun 2013 – 2015 adalah rawan. Indikator dalam ketahanan pangan disajikan berdasarkan tiga jenis indikator (Materi Rakor Pokja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Riau, 2016) yaitu:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Aspek Ketersediaan

Data yang digunakan untuk mencari ketersediaan adalah produksi bersih kelompok serealia (beras, jagung,ubi kayu dan ubi jalar) dibagi jumlah penduduk (populasi). Kemudianuntuk mencari ratio ketersediaan adalah dengan membagi ketersediaan panganserealia dengan nilai konsumsi normatif (300 gram perkapita/hari), dengan asumsi bahwa dengan mengkonsumsi serealia sedikitnya300 gram/hari, diperkirakan 50% kebutuhan kalori sudah terpenuhi.

2. Aspek Akses Pangan

Aspek akses pangan dinilai dengan pendekatan pesentase Kepala keluarga Pra - KS dan KS-1alasan ekonomi dengan batasan-batasan :

a. Persentase Pra sejahtera dan sejahtera I (r) > 20 dengan bobot 1 diberi warnahijau dengan kategoriAman
b. Persentase Pra sejahtera dan sejahtera I, 20 < r > 40 dengan bobot 2 diberi warna kuning dengan kategori Waspada
c. Persentase Pra sejahtera dan sejahtera I,r > 40 dengan bobot 2 diberi warna merah dengan kategori Rawan.

Untuk memperkuat analisis aspek akses pangan dilakukan juga analisis deskriptif dengan menggunakan data-datapendukung seperti harga bulanan dan Indeks pembangunan manusia (IPM).

3. Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek pemanfaatan pangan dilakukan dengan pendekatanstatus gizi suatumasyarakat berdasarkan jumlah balita yang menderita gizi kurangdan gizi buruk. Data atau informasiyang diperlukan adalah :

a. Jumlah Balita yang ditimbang

b. Jumlah Balita penderita gizi kurang

c. Jumlah Balita penderita gizi buruk

Data status gizi diatas, dianalisis dengan batasan-batasan ;

a. Prevalensi gizi kurang /buruk pada Balita dengan persentase r < 15 dengan bobot 1 diberi warna hijau

b. Prevalensi gizi kurang /buruk pada Balita dengan persentase15 < r< 20 dengan bobot 2 diberi warnakuning

c. Prevalensi gizi kurang /buruk pada Balita dengan persentase r >20 dengan bobot 3 diberi warna merah.

4. Analisis Komposit

Ketiga indikator tersebut diatas digabung (dikompositkan) menjadi satu informasi pangan dan gizi wilayah, dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

a. Menjumlahkan ketiga nilai skor pangan ,gizi dan kemiskinan

b. Jumlah ketiga nilai indikator maksimum 9, dan jumlah yang terendah 3.

Total skor ketiga indikator (bobot) ditetapkan range :

a. Total bobot 3 - 4 warna hijau (Aman)

b. Total bobot 5 - 6 dan tidak ada skor 3 = warna kuning (Waspada)

c. Total bobot 5 - 9 ada skor 3 = warna merah (Rawan)

1. Status Ketersediaan Pangan

Berdasarkan kondisi ketersediaan pangan di kabupaten/kota di provinsi Riau sebagian besar berada pada kondisi rawan, artinya produksi pangan yang ada di daerah tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan pada tahun 2015 hanya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kabupaten Kuantan Singingi dan Pelalawan yang mempunyai status waspada. Disamping itu terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami status rawan pada aspek ketersediaan pada tahun 2015 dibanding tahun 2013. Pada tahun 2015 terdapat 10 kabupaten/ kota yang mempunyai status rawan, sedangkan pada tahun 2013 teradapat 9 kabupaten/kota (Tabel 2.1).

Aspek ketersediaan pangan dipengaruhi oleh faktor :

a. produksi,
b. luas panen, tingkat produktivitas dan diversifikasi,
c. kondisi irigasi, teknologi, kredit dan sarana produksi,
d. cadangan pangan,
e. bantuan pangan,
f. jumlah penduduk,
g. sarana dan prasarana pemasaran,
h. keadaan iklim, hama, penyakit dan bencana,
i. pasokan pangan dari luar.

Ketersediaan pangan suatu wialyah/ daerah dipengaruhi oleh faktor produksi dan perdagangan pangan. Produksi pangan bergantung pada berbagai faktor; seperti iklim, sifat tanah, curah hujan, irigasi, komponen produksi pertanian yang digunakan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan pangan (DKP dan WFP, 2010).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.1 Perkembangan Rasio dan Status Ketersediaan Pangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013 – 2015

No	Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015	
		Rasio	Status	Rasio	Status	Rasio	Status
1.	Kuantan Singingi	0,89	3	0,96	2	0,96	2
2.	Indragiri Hulu	0,28	3	0,31	3	0,29	3
3.	Indragiri Hilir	1,08	2	1,02	2	0,82	3
4.	Pelalawan	1,11	2	1,12	2	0,92	2
5.	Siak	0,49	3	0,52	3	0,56	3
6.	Kampar	0,53	3	0,34	3	0,35	3
7.	Rokan Hulu	0,63	3	0,51	3	0,63	3
8.	Bengkalis	0,28	3	0,27	3	0,31	3
9.	Rokan Hilir	0,99	2	0,44	3	0,39	3
10.	Kep. Meranti	0,23	3	0,26	3	0,36	3
11.	Pekanbaru	0,03	3	0,06	3	0,11	3
12.	Dumai	0,25	3	0,16	3	0,15	3
RIAU		0,56	3	0,47	3	0,46	3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, 2016

2. Status Aksesibilitas Pangan

Akses pangan menunjukkan jaminan bahwa setiap rumah tangga dan individu mempunyai sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan norma gizi. Kondisi tersebut tercermin dari kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan produksi pangan, selain itu, juga tergantung pada pengetahuan atau dimensi sumberdaya manusia serta sumberdaya sosial. Akses pangan diindikasikan oleh sumber pendapatan, akses terhadap kredit modal. Gejala-gejala dini terjadinya rawan pangan diindikasikan dengan tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan rendahnya daya beli individu / rumah tangga terhadap pangan.

Status akses pangan di kabupaten/kota provinsi Riau pada tahun 2015 lebih baik dibanding pada tahun 2014 maupun tahun 2013. Pada tahun 2015 hanya kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai status rawan, dan terdapat 5

kabupaten/kota yang mempunyai status aman. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan persentase keluarga miskin di masing-masing kabupaten/ kota (Tabel3).

Akses pangan (*food accessability)* dipengaruhi oleh :

a. akses ekonomi (pendapatan, kesempatan kerja dan harga pangan),
b. akses fisik /isolasi daerah (sarana dan prasarana perhubungan),
c. akses social (preferensi terhadap jenis pangan, pendidikan, keberadaan konflik dan bencana.

Indikator akses pangan meliputi antara lain sumber pendapatan, akses terhadap kredit modal. Indikator akses pangan juga meliputi strategi rumah tangga untuk memenuhi kekurangan pangan.

Tabel 2.2 Perkembangan Persentase Keluarga Miskin dan Status Akses Pangan diKabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2013 – 2015

No	Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015	
		% Keluarga Miskin	Status	% Keluarga Miskin	Status	% Keluarga Miskin	Status
1.	Kuantan Singingi	26,56	2	23,68	2	21,04	2
2.	Indragiri Hulu	35,99	2	35,74	2	16,87	1
3.	Indragiri Hilir	40,10	3	44,51	3	12,69	1
4.	Pelalawan	43,81	2	28,21	2	16,84	1
5.	Siak	23,79	2	22,74	2	20,18	2
6.	Kampar	27,34	2	21,34	2	24,48	2
7.	Rokan Hulu	31,38	2	25,09	3	21,46	2
8.	Bengkalis	31,65	2	31,65	2	14,67	1
9.	Rokan Hilir	39,77	2	33,53	2	35,67	2
10.	Kep. Meranti	58,73	3	78,31	3	48,02	3
11.	Pekanbaru	13,82	1	12,93	1	13,02	1
12.	Dumai	27,71	2	28,13	2	27,10	2
RIAU		30,81	2	28,83	2	21,02	3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, 2016

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Status Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan dipengaruhi oleh faktor pola makanan, kehilangan karena pemasakan, distribusi makanan dalam keluarga, besarnya keluarga, pangan yang tercecer, keadaan kesehatan, kepercayaan budaya, kepercayaan keagamaan, status sosial, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan status gizi. Pola kebudayaan ini mempengaruhi orang dalam memilih pangan, jenis pangan yang harus diproduksi, pengolahan, penyaluran, penyiapan, dan penyajian. Konsumsi pangan termasuk konsumsi energi dan protein sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap pangan dan gizi. Data status gizi keluarga dapat mempertajam pengambilan keputusan apakah rumah tangga mengalami gangguan ketahanan pangan, karena pegukuran antropometrik dapat menjadi indikasi keadaan setelah terjadi ketidak tahanan pangan atau ketahanan pangan (DKP dan WFP, 2010)

Hasil analisis terhadap prevalensi balita kurang energi protein (KEP) diperoleh bahwa status pemanfaatan pangan dimasing-masing kabupaten /kota di provinsi Riau menunjukkan perkembangan kerarah yang lebih baik. Pada tahun 2015 tidak ditemukan kabupaten yang memiliki status waspada maupun rawan dalam status pemanfaatan pangan, sedangkan tahun 2013 dan 2014 masih terdapat kabupaten yang mempunyai status waspada (kabupaten Indragiri Hilir) dan rawan (kabupaten Kuantan Singingi.

4. Status Ketahanan Pangan

Dari hasil pengggabungan ketiga indikator (dikompositkan) diperoleh bahwa pada tahun 2015, hanya 2 (dua) kabupaten yang memiliki status ketahanan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pangan yang tidak rawan yakni kabupaten Pelalawan (Aman) dan kabupaten Kuantan Singingi (Waspada) (Tabel 5). Hasil analisis menunjukkan bahwa status ketersediaan pangan kabupaten/ kota mempengaruhi status ketahanan pangan wilayah.

Masalah kerawanan pangan adalah bersifat multi dimensi yang meliputi dimensi sosial, ekonomi maupun politik sehingga pendekatan terhadap pemecahannya tidak hanya mengandalkan perbaikan satu sisi saja. Oleh karena rawan pangan mungkin terjadi sepanjang sejarah hidup manusia, maka perlu kiranya dicari konsep-konsep penanganannya yang lebih efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Pangan merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia dan pangan merupakan komoditas paling penting bagi masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya pangsa pengeluaran untuk pangan terhadap pendapatan rumah tangga bagi golongan masyarakat tersebut. Apabila pengertian pangan dalam konsep ketahanan pangan diartikan sebagai pangan pokok (beras), data agregat konsumsi bahan pokok ternyata telah mencapai 19 % lebih tinggi dari standar kecukupan yang dianjurkan. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa walaupun secara nasional maupun regional (provinsi) ketahanan pangan (*food security*) nampak tidak menjadi masalah, ternyata di tingkat rumahtangga masalah kerawanan pangan masih ditemui (Dewan Ketahanan Pangan, 2010)

Kondisi rawan pangan sering berkaitan dengan masalah kemiskinan *(proverty).* Namun tidak selalu kondisi rawan pangan harus disertai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

masalah kemiskinan. Karena kondisi rawan pangan dapat saja berlangsung pada situasi dimana kemiskinan tidak lagi menjadi masalah utama (Saliem, dkk, 2002).

2.4 Kebijakan Ketahanan Pangan

Istilah ketahanan pangan dalam kebijaksanaan dunia, pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB, tetapi Indonesia secara formal baru mengadopsi ketahanan pangan dalam kebijakan dan program pada tahun 1992, yang kemudian definisi ketahanan pangan pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang dihasilkan kemudian sehingga diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan dalam beberapa pasal antara lain Pasal 60 bahwaPemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal untuk mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif.

Sejak tahun 2010 Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan sesungguhnya telah melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang juga merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 TentangKebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan BerbasisSumber Daya Lokal, yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut merupakan acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifanlokal serta kerja sama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah,dan masyarakat.

Di Provinsi Riau, sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau diserahkan wewenang, tugas dan tangung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan di daerah, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.

Adapun Uraian Jabatan stuktural pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Program;
2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:

1. Seksi Ketersediaan Pangan;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Seksi Akses Pangan; dan

3. Seksi Kerawanan Pangan.

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:

1. Seksi Distribusi Pangan;

2. Seksi Harga Pangan; dan

3. Seksi Cadangan Pangan.

e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas:

1. Seksi Konsumsi Pangan;

2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan

3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

f. Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas :

1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;

2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan

3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin olehKepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Penelitian ini dilakukan di satu bidang yaitu bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sesuai arahan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi riau.

2.5 Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan dalam beberapa pasal antara lain Pasal 60 bahwa Pemerintah dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal untuk mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif.

Sejak tahun 2010 Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan sesungguhnya telah melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang juga merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut merupakan acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) untuk pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Sebagai bentuk keberlanjutan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber DayaLokal diimplementasikan melalui kegiatan:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Konsep KRPL

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya inidilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah,serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/wargayang saling berdekatan sehingga akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiridari hasil optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan *(sustainable agriculture),* antara lain dengan membangun kebun bibitdan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom)* sehingga kelestarian alam pun tetapterjaga. Implementasi kegiatan ini disebut Kawasan rumah Pangan Lestari.

2. Pengembangan Pangan Pokok Lokal

Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dilaksanakan dalam rangka mengembalikan pola konsumsi masyarakat kepada budaya dan potensi setempat. Pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada potensi dan kebutuhan setempat.

Pada prinsipnya, kegiatan MP3L dilaksanakan untuk mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras danterigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

keluarga berpendapatan rendah. Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi,sagu, pisang, sukun, labu kuning sudah banyak dikembangkan menjadi tepung. Selanjutnya aneka tepung ini diharapkan dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagaisumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan "nasi non-beras" yang dapat disandingkan dengan"nasi beras" sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan khususnya berbasis aneka tepung berbahan baku lokal serta pengembangan pengolahan tepung lokal menjadi pangan "*intermediate.*"

3. Sosialisasi dan Promosi P2KP

Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, perubahan sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkanpangan lokal sebagai sumber gizi keluarga untuk pola hidup yangsehat, aktif dan produktif.

2.6 Ketahanan Pangan Dalam Pandangan Islam

Ketahanan pangan dalam sistem Islam tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi tiap individu ini akan menentukan ketahanan pangan Daulah. Selain itu, ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh rakyat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Hal itu berpengaruh pada kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Juga mempengaruhi tingkat kemajuan, daya saing dan kemampuan negara untuk memimpin dunia.Lebih dari itu, negara harus memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan pangan utama dari daam negeri. Sebab jika pangan pokok dan pangan utama berkaitan dengan hidup rakyat banyak tergantung pada negara lain melalui impor hal itu bisa membuat nasib negara tergadai pada negara lain.

Ketergantungan pada impor bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap politik, kestabilan dan sikap negara. Ketergantungan pada impr juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan moneter, bahkan bisa menjadi pemicu krisis. Akibatnya stabilitas dan ketahanan negara bahkan eksistens negara sebagai negara yang independen, secara keseluruhan bisa menjadi taruhan.

Karena itu ketahanan pangan dalam Islam mencakup: (1) Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan; (2) Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat; dan (3) Kemandirian Pangan Negara.

Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pangan Negara dalam pandangan Islam memiliki tugas untuk melakukan kepengurusan terhadap seluruh urusan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

rakyatnya, baik dalam ataupun luar negri (ri'âyah su`ûn al-ummah). Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan (selain kebutuhan pokok sandang dan papan serta kebutuhan dasar pendidikan,kesehatan dan keamanan) seluruh rakyat individu per individu. Dalil bahwa itu merupakan kebutuhan pokok diantaranya bahwa imam Ahmad telah mengeluarkan hadits dengan sanad yang dishahihkan oleh Ahmad Syakir dari jalur Utsman bin Affan ra., bahwa Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ، وَجِلْفِ الْخُبْزِ، وَثَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَالْمَاءِ، فَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ لابْنِ آدَمَ فِيهِ حَقٌّ

Artinya: *"Segala sesuatu selain naungan rumah, roti tawar, dan pakaian yang menutupi auratnya, dan air, lebih dari itu maka tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya".*

Hadits tersebut juga dinyatakan dengan lafazh lain:

لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ

Artinya: *"Anak Adam tidak memiliki hak pada selain jenis ini: rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya dan roti tawar dan air (HR at-Tirmidzi dan ia berkata hasan shahih)."*

Ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan di dalam lafazh hadits itu yaitu pangan, papan dan sandang: *zhillu baytin* – naungan rumah, *bayt yaskunuhu* – rumah yang ia diami, *tsawbun yuwârî 'awratahu* – pakaian yang menutupi auratnya, *jilfu al-hubzi wa al-mâ'* – roti tawar dan air, itu sudah cukup dan di dalamnya ada kecukupan. Sabda Rasul di dalam hadits tersebut *apa yang lebih*

dari ini maka anak Adam tidak memiliki hak di dalamnya di sini sangat gamblang bahwa tiga kebutuhan inilah yang merupakan kebutuhan pokok. Kedua hadits ini menyatakan tentang kebutuhan-kebutuhan pokok yaitu pangan, papan dan sandang. Yang lebih dari itu maka bukan kebutuhan pokok, dan pemenuhannya terjadi dimana kebutuhan-kebutuhan pokok individu itu telah terpenuhi.

2.7 Definisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan definisi konsep pada karya ilmiah yang berjudul "Peranan Badan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Riau dalam Meningkatkan Status Ketahanan Pangan di Provinsi Riau", adalah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Perananadalah suatu fungsi yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang individu atau organisasi, lembaga, ataupun badan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.
2. Yang dimaksud dengan ketahanan pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Yang dimaksud dengan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) untuk pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan panganmasyarakat.

2.8 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan unsure-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Secara teoritis menurut Hatch dan Farhady (2006:38) mengatakan bahwa variabel dapat diartikan sebagai atribut seseorang atau objek yang dasar dalam penelitian beserta objek yang mempunyai variasi antara satu objek dengan objek lainnya. Sedangkan menurut Arikunto (2002:94) mengatakan variabel adalah sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam jenis kelamin, maksudnya yaitu adalah sebuah titik awal atau tanda dari apa yang ingin dilakukan.

Kemudian berdasarkan dari pendapat-pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa variabel penlitian adalah suatu atribut atau objek dari sifat apa yang ingin kita teliti yang merupakan keinginan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.3 Variabel dalam Indikator

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan Dinas Ketahanan Pangan dalam Meningkatan Ketahanan Pangan	1 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Konsep KRPL	1. Pembentukan Kelompok Wanita beranggotakan 15-25 orang 2. Pemberian bantuan kebun bibit 3. Dilakukan dengan Pendamping/ Penyuluh
	2. Pengembangan Pangan Pokok Lokal	1. Perencanaan produk pangan pokok lokal 2. Disesuaikan dengan selera masyarakat dan budaya konsumsi pangan setempat 3.Jaminan kontinyuitas ketersedian bahan baku pangan pokok lokal
	3 Sosialisasi dan Promosi P2KP	1. Penayangan iklan di media massa (cetak dan elektronik) 2. Mengadakan pameran P2KP 3. Kerjasama dengan PKK dan Sekolah

Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

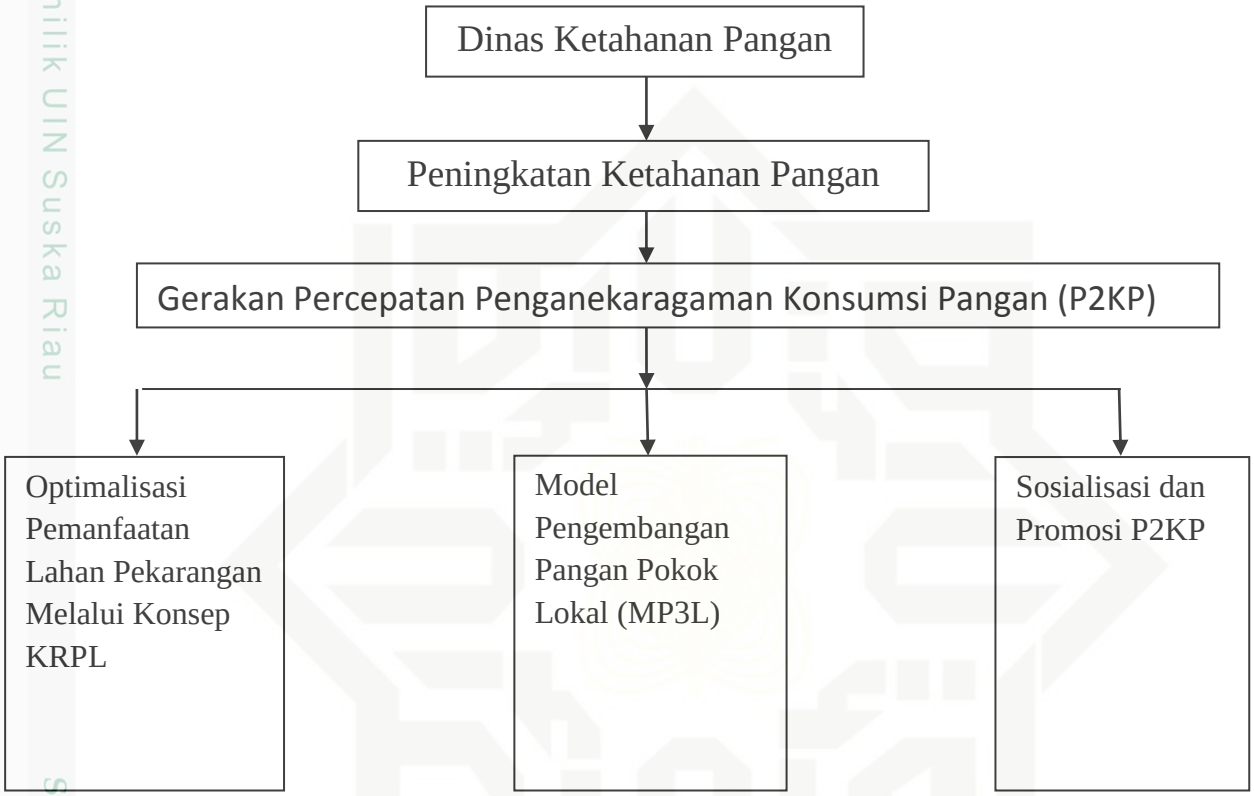

Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Heni Susilowati pada tahun 2014 tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yangmempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga miskin di Kecamatan SrandakanBantul. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, umurkepala rumah tangga, status perkawinan, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 variabel dari 6

variabel yang ditelaah berpengaruh dan signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tanggamiskin di Kecamatan Srandakan Bantul. Variabel tersebut adalah pendapatanrumah tangga, jumlah anggota keluarga, status perkawinan dan umur kepala rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Meilita R pada tahun 2009 tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Kabupaten Jember. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui peta wilayah yang memiliki ketahanan pangan yang sangat baik serta pengaruh luas lahan tanam padi, jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja terhadap hasil produksi padi di Kabupaten Jember. Metode anlisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks ketahanan pangan yang digunakan untuk mengetahui peta wilayah yang memiliki ketahanan pagan yang terbaik dan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengarui ketahanan pangan di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan indeks ketahanan pangan, wilayah yang memiliki ketahanan pangan yang sangat baik di Kabupaten Jember adalah Kecamatan Wuluhan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Jember adalah luas lahan tanam padi yang berpengaruh positif dan signifikan, dan jumlah penduduk yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah poduksi padi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dino Predi pada tahun 2012 tentang Peranan Badan Ketahanan Pangan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berupaya meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau melalui berbagai program strategis yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Usaha-usaha yang dilakukan antara lain koordinasi antar lembaga daerah yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan daerah, inventarisir data kondisi ketahanan pangan, distribusi pangan antar daerah, percepatan diversifikasi konsumsi pangan, penanganan daerah rawan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, pemberdayaan lumbung pangan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.